

**STUDI ANALISIS PERENCANAAN PROGRAM KERJA
BIDANG USAHA PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA AL-IKHLAS
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**



Oleh :

UTAMI SETYO SANTOSO
NIM. B34304001

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K D-2009 002 PMB	No. REG : D-2009/MD/002
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

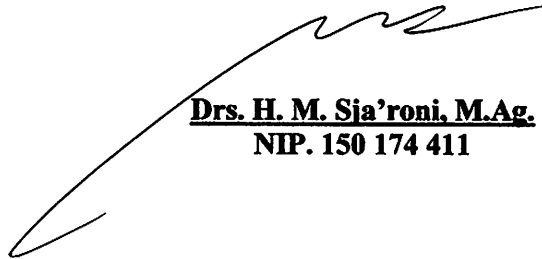
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FEBRUARI 2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Utami Setyo Santoso** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 07 Januari 2009

Pembimbing,



Drs. H. M. Sja'roni, M.Ag.
NIP. 150 174 411

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Utami Setyo Santoso** ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Januari 2009

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Dakwah



Dekan,

Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip. IS
NIP. 150 194 059

Ketua,

Drs. H. M. Sja'roni, M.Ag
NIP. 150 174 411

Sekretaris,

Drs. M. Taqwim Suji
NIP. 150 190 295

Penguji I,

Drs. H. M. Nadhīm Zuhdi, MM
NIP. 150 152 383

Penguji II,

Drs. H. Mushonief Marsholy
NIP. 150 178 179

Perencanaan ini merupakan suatu ikhtiar untuk menjamin agar setiap usaha kerjasama itu berhasil dengan sukses, bukan saja “apa” yang harus diperbuat, melainkan “bagaimana”, “dimana”, “kapan” dan oleh “siapa”. Segala sesuatu harus dilaksanakan, untuk melihat hakekat inti dari perencanaan. Para ahli di dalam manajemen mengemukakan pendapat selalu berlainan dan belum mempunyai sesuatu kesepakatan, meskipun mempunyai prinsip yang sama.

Disamping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar dihadapi pada saat pengelolaan organisasi berlangsung. Perencanaan itu juga mendorong untuk terlebih dahulu membuat perkiraan dan perhitungan. Mengenai berbagai kemungkinan yang akan timbul dan dihadapi, berdasarkan hasil penilaian, pengamatan dan penganalisaannya terhadap sesuatu dan kondisi yang ada.

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena *organizing*, *actuating*, maupun *controlling*-pun adalah dinamis, perencanaan itu ditujukan untuk masa yang depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan situasi dan kondisi, dengan perencanaan diharapkan dapat meminimalkan ketidakpastian suatu tindakan. Dengan mengasumsikan kondisi tertentu dimasa mendatang dan menganalisis konsekuensi dari tiap tindakan, ketidakpastian dapat dikurangi dan keberhasilannya mempunyai probabilitas yang lebih besar.

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya disini tidak lain adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.² Planning (perencanaan) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.³

Perencanaan berperan menentukan tujuan dan prosedur mencapai tujuan, memungkinkan organisasi mendapat sumber daya untuk mencapai tujuan, memperjelas bagi anggota pengurus yang melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang memungkinkan untuk memantau dan mengukur keberhasilan organisasi serta mengatasi bila ada kekeliruan.

Langkah-langkah perencanaan adalah berupa penentuan tujuan organisasi, tujuan organisasi untuk melaksanakan program itu sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan, segera setelah tujuan dan program ditetapkan kemudian disusun untuk melaksanakan program itu sesuai dengan besar kecilnya dari jenis yang akan dilaksanakan, orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi juga harus ditentukan dan didapatkan sehingga organisasi dapat berperan dengan maksud pendirian dan penentuan.⁴

Melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perencanaan itu penting dalam penentuan tujuan dan perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama yang membutuhkan pemikiran yang matang dan perhatian serius

²A.W. Wijaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), h. xiii

³A.W. Wijaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, h. 33

⁴Amin Widjaya Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.

dalam pelaksanaannya. Suatu tujuan tanpa diawali dengan perencanaan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, karena rencana yang tidak terarah akan menimbulkan ketidak pastian. Dengan demikian jelas bahwa organisasi pada prinsipnya sama yaitu membutuhkan proses manajemen terutama perencanaan. Demikian juga halnya dengan Koperasi Pengawas Republik Indonesia Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya (KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya), agar dalam menjalankan aktivitasnya yang ada di KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya berjalan secara optimal perlu adanya perencanaan program yang akan dilakukan.

KPRI Al-Ikhlas yang ada di Kandepag Kota Surabaya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan sosial yang membantu memajukan kesejahteraan anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka kemajuan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. agar tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan secara optimal dan efektif, maka disinilah letak pentingnya perencanaan.

KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya adalah sebuah organisasi ekonomi sosial yang telah menerapkan perencanaan. Hal itu disadari oleh adanya kenyataan bahwa pengurus KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya yang telah mempunyai pemikiran dan konsep yang terprogram demi perkembangan dan kemajuan koperasi pada masa yang akan datang. Sehingga pengurus KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya terlebih dahulu telah

akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan melihat dan memikirkan peluang dan ancaman yang ada atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan organisasi pada masa yang akan datang. Karena dengan perencanaan, seseorang dapat mengungkapkan peluang dan menjelaskan cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

b. Jenis-jenis Perencanaan

Perencanaan telah diterapkan pada semua jenis kegiatan dan sesungguhnya berbagai jenis perencanaan. Beberapa rencana meliputi : kegiatan yang sangat luas, sedangkan ada juga yang meliputi kegiatan terbatas saja, ada yang semata-mata meliputi pertimbangan operasional, sedangkan yang lain menitikberatkan pada pelaksanaan, biaya, kualitas atau unsur-unsur penting lainnya.

Menurut G.R. Terry bahwa jenis rencana dapat diklarifikasikan menjadi :

- 1) Rencana pengembangan. Rencana-rencana pengembangan tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari organisasi. Cara rasional untuk mengetahui pengembangan yang diinginkan itu ialah berdasarkan sepakat para anggota manajemen yang berwenang dalam menentukan pengembangan tersebut. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang posisi organisasi arah tujuannya dan sasaran yang harus dicapai, masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi, dalam rangka pencapaian tujuannya, timing

untuk melaksanakan pengembangan rencana dan kegiatan-kegiatan khusus perlu dilaksanakan untuk mencapainya.

- 2) Rencana Pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara pelaksanaan yang telah ditentukan untuk memakai cara yang lebih baik.
- 3) Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota-anggota manajemen yang ada yang menjadi semakin hari semakin penting. Tidaklah bijaksana untuk membiarkan anggota-anggota manajemen menghadapi tantangan-tantangan tanpa adanya suatu perencanaan kebijaksanaan. Tindakan tertentu yang disesuaikan menumbuhkan kepemimpinan dan untuk mengembangkan anggota-anggota manajemen.

Klasifikasi dari rencana-rencana tersebut adalah sesuai dengan waktu yang diliput oleh rencana-rencana yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat rencana-rencana dilihat dari segi waktu jangka panjang (meliput waktu lima tahun atau lebih) dan rencana jangka pendek (meliput waktu dua tahun atau kurang). Rencana-rencana yang meliput waktu tiga hingga lima tahun kadang-kadang dianggap berjangka pendek atau juga dianggap jangka panjang, tergantung dari organisasi yang bersangkutan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa rencana-rencana seperti itu adalah berjangka sedang, tetapi tidak begitu umum disebut demikian.

3. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Koperasi”, menyatakan bahwa di Indonesia pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi tahun 1967 no. 12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.²⁹

Dari pengertian menurut undang-undang tersebut, sudah jelas bahwa koperasi seharusnya menjadikan anggota sebagai ketentuan (inti), jadi anggotalah yang berperan serta secara aktif dalam kegiatan koperasi.

Dalam buku “Manajemen Koperasi”, Sukamdiyo menjelaskan bahwasannya untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perkoperasian no. 25 tahun 1992 pada BAB I pasal 1 ayat 1 UU 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan”.³⁰

²⁹ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, hal. 4

³⁰ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, hal. 6

pertama di Leuwiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1885.

Pada hari itu, Raden Ngabehi Ariawiriaatmadja, patih Purwokerto, bersama kawan-kawan, telah mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang, yang dikala itu merajalela. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diberi nama "*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*". Dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih sama dengan Bank Simpan Pinjam para "priyayi" Purwokerto. Dalam bahasa Inggris (bagi generasi pasca Belanda) sama dengan "*The Purwokerto Mutual Loan And Savings Bank for Native Civil Servants*". Para pegawai (punggawa atau amtenaar) pemerintah kolonial Belanda biasa disebut "priyayi", sehingga banknya disebut "bank priyayi". Gebrakan patih Wiriaatmadja ini mendapat dukungan penuh asisten residen Purwokerto E. Sieburg, atasan sang patih.

Tidak lama kemudian, E. Sieburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode yang baru datang dari negeri Belanda, dan ingin mewujudkan cita-citanya menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. Koperasi tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetuskan Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Jerman dan yang dipelajari de Wolf Van Westerode selama ia cuti di negara itu. De

Wolf van Westerde memperluas jangkauan dan lingkup “*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” sampai ke desa-desa dan mencakup pula Kredit Pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah “*De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Creditbank*” atau bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah Lumbung-Lumbung Desa di pedesaan Purwokerto. Lumbung Desa adalah lembaga simpan pinjam para petani dalam bentuk bukan uang, namun In-natura (simpan padi, pinjam uang). Maklum seabad yang silam uang (tunai) teramat langka di pedesaan.

Perlu diingat bahwa Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia. Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH Boeke sebagai Adviseur voor Volks-Credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pada bulan September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah *Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen* (sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putera). Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut

Peraturan Koperasi 1927, pada akhir tahun 1930 didirikanlah jawatan koperasi. Jawatan koperasi waktu itu dipimpin oleh Prof. JH Boeke. Sejak lahirnya Jawatan Koperasi (1930-1934) masuk dalam lingkungan Departemen BB (Departemen Dalam Negeri). Kemudian pada tahun 1935, Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen EZ (Departemen Kehakiman).

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Dalam proses perjuangan gerakan koperasi pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Di Jawa Barat, didirikan Bank Propinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk mengadakan pemusatan usaha dalam jasa keuangan bagi gerakan koperasi di Jawa Barat.

Pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKO I) di

Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1965, dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan MUNASKOP II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU baru. Perlu diketahui bahwa pada tahun yang sama pula terjadi pada pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.

Kemudian pada tahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit (45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit, selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992 UU No. 12 tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perencanaan ternyata merupakan bagian yang penting sekali dalam keberhasilan koperasi. Seorang pengurus koperasi atau manajer adalah orang yang seharusnya mahir membuat rencana dengan baik. Agar perencanaan dapat juga diperbaharui setiap waktu (*up to date*) dibutuhkan data yang lengkap dan informasi yang canggih. Administrasi yang baik serta komunikasi yang luas dan bermutu merupakan pendukung yang berguna sekali bagi perencanaan yang baik. Penyusunan rencana yang baik dalam koperasi harus bersifat *bottom up* (usulan dari bawah), yaitu dari kepala unit / Kabag yang ada sehingga merupakan usulan unit (bidang) yang dikirim ke manajer. Setelah dirangkum oleh manajer, berarti usulan itu sudah merupakan rencana keseluruhan koperasi yang selanjutnya dikirim ke pengurus. Oleh pengurus, rencana tersebut diusulkan kepada anggota dalam rapat anggota untuk mendapatkan pengesahan.

Setelah rencana tersebut dibahas dan disetujui oleh rapat anggota serta disahkan, kemudian dikembalikan lagi kepada pengurus untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus. Rencana yang berkaitan dengan bidang usaha sehari-hari yang akan dilaksanakan koperasi dikirim ke manajer, lalu disampaikan kepada para kepala unit untuk dilaksanakan. Urutan perjalanan penyusunan rencana tersebut dapat dilaksanakan perbidang atau

- a. Koordinator yang bertugas mengkoordinir kegiatan unit-unit yang dijalankan (simpan pinjam dan konsumsi) adalah dengan mengangkat kelompok kerja (*team work*) di bawah pimpinan ketua pengurus untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan unit-unit yang terkait. Kelompok kerja ini terdiri dari pengurus unit simpan pinjam dan pengurus unit pertokoan.
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk menerapkan fungsi koordinasi dalam mewujudkan tujuan koperasi karyawan Siti Hajar Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengadakan pertemuan, pertemuan yang diadakan antara lain :
 - a) Pertemuan antara ketua pengurus dan badan pengawas.
 - b) Pertemuan antara ketua pengurus dengan pengurus.
 - c) Pertemuan antara para pengurus inti dengan unit pelaksana atau karyawan koperasi.
 - d) Pertemuan antara semua unsur yang ada (Rapat Anggota).
 - 2) Membuat buku pedoman, yaitu untuk unit pertokoan.
 - 3) Koordinasi dengan prinsip kesatuan komando.

Adapun persamaan yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang koperasi, namun perbedaannya adalah obyek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti pada Koperasi Karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo, sedangkan peneliti disini meneliti pada KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya, kemudian penelitian terdahulu tersebut mengkaji tentang penerapan koordinasi dalam koperasi karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo, sedangkan peneliti disini yang dikaji adalah analisis perencanaan program kerja yang ada di KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya.

Dengan demikian berarti seorang peneliti harus secara integrative terjun ke lokasi penelitian, sehingga data-data yang didapatkan nantinya benar-benar menyeluruh dan mendalam, alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini dengan pertimbangan bahwa metode penelitian ini dirasa lebih peka dan sensitif, terhadap apa yang sedang diteliti. Juga memudahkan memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dan dengan fokus yang mendalam serta rinci.

Karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan dan tergolong sebagai bentuk penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik sebab penelitian kualitatif ini dilakukan dalam setting alami di lapangan, bukan di laboratorium, menggunakan metode alami (observasi, interview, pikiran dan tulisan). Jadi kesimpulannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Tujuan penelitian kualitatif diangkat sebagai metode untuk melihat proses perencanaan dan analisis program kerja bidang usaha pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya (KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya). Dan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini didasarkan pada :

1. Dilakukan pada latar alamiah atau obyek yang konteks (keutuhan), yaitu menggambarkan obyek yang diteliti (KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya) termasuk tentang pelaksanaan program kerja, dalam hal ini perencanaan yang sangat dibutuhkan, sehingga dengan demikian tindakan pengamat sangat mempengaruhi terhadap apa yang diteliti.

sedangkan model yang dipakai dalam mengoperasionalkannya peneliti memakai model deskriptif yang bersifat developmental, biasanya digunakan untuk segala jenis bidang.

Dengan berdasarkan pada kerangka berfikir deskriptif model developmental, maka penulis berusaha mengungkapkan perencanaan dalam penerapan program kerja KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya, sekaligus perubahan yang terjadi dalam KPRI Al-Ikhlas itu sendiri yang menyangkut perencanaan, jadi penelitian deskriptif yang bersifat developmental, pengujian datanya dibandingkan dengan suatu kriteria atau standart, yang sudah ditetapkan terlebih dahulu (yaitu pedoman umum dan petunjuk perencanaan program kerja).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jadi jenis penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, karena melalui pendekatan tersebut lebih untuk mengidentifikasikan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Studi Analisis Perencanaan Program Kerja Bidang Usaha Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya”.

Maksud dari hasil penelitian ini adalah memberi gambaran secara utuh tentang perencanaan program kerja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Penelitian berguna untuk mendeskripsikan tentang Studi Analisis Perencanaan Program Kerja Bidang Usaha Pengurus Koperasi Pegawai

- e. Job Discription KPRI AI-Ikhlas
- f. Susunan pelaporan pertanggung jawaban KPRI AI-Ikhlas
- g. Konsep dasar perencanaan dalam KPRI AI-Ikhlas
- h. Arti perencanaan bagi KPRI AI-Ikhlas
- i. Jenis-jenis perencanaan yang digunakan oleh KPRI AI-Ikhlas
- j. Manfaat adanya perencanaan bagi KPRI AI-Ikhlas
- k. Proses perencanaan di KPRI AI-Ikhlas
- l. Ciri-ciri perencanaan yang ada di KPRI AI-Ikhlas
- m. Program kerja apa saja yang dilaksanakan KPRI AI-Ikhlas
- n. Siapa yang melaksanakan program kerja tersebut
- o. Cara untuk merumuskan strategi pelaksanaan program kerja KPRI AI-Ikhlas
- p. Proses penyusunan program kerja KPRI AI-Ikhlas
- q. Implementasi atau penerapan program kerja di lapangan, sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaannya
- r. Sistem pemantauan / pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kerja.
- s. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan program kerja tersebut.
- t. Metode yang digunakan untuk memanaj program kerja yang dilaksanakan.
- u. Kuantitas SDM yang dimiliki KPRI AI-Ikhlas.
- v. Prinsip dalam menjalankan program kerja yang ada di KPRI AI-Ikhlas.

	pertanggungjawaban KPRI AI-Ikhlas	KPRI AI-Ikhlas dan dokumen Pengawas Hasil RAT KPRI AI-Ikhlas Tahun 2008	
13	Rancangan program kerja dan RAPB KPRI AI-Ikhlas	Dokumen pengurus KPRI AI-Ikhlas	D
14	Apakah KPRI AI-Ikhlas punya konsep dalam perencanaan	Ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
15	Apa arti perencanaan bagi KPRI AI-Ikhlas	Wakil ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
16	Apa saja jenis perencanaan yang digunakan oleh KPRI AI-Ikhlas	Ketua Pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
17	Apa manfaat adanya perencanaan bagi KPRI AI-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
18	Bagaimana proses perencanaan di KPRI AI-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
19	Bagaimana ciri-ciri perencanaan yang ada di KPRI AI-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
20	Program kerja apa saja yang dilaksanakan KPRI AI-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI AI-Ikhlas	W
21	Siapa yang melaksanakan program kerja tersebut	Bendahara I KPRI AI-Ikhlas	W
22	Bagaimana cara untuk merumuskan strategi pelaksanaan	Kepala unit simpan pinjam KPRI AI-Ikhlas	W

	program kerja di KPRI Al-Ikhlas		
23	Bagaimana proses penyusunan program kerja KPRI Al-Ikhlas	Wakil ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas	W
24	Bagaimana implementasi atau penerapan program kerja di lapangan, sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaannya	Sekretaris KPRI Al-Ikhlas	W
25	Bagaimana sistem pemantauan atau pengawasan program kerja	Ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas	W
26	Sarana dan prasarana apa yang digunakan dalam menjalankan program kerja tersebut	Kepala unit pertokoan KPRI Al-Ikhlas dan observasi	W + O
27	Metode apa yang digunakan untuk memenaj program kerja yang dilaksanakan	Ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas	W
28	Bagaimana kuantitas SDM yang dimiliki KPRI Al-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas dan wakil ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas	W
29	Bagaimana dengan prinsip dalam menjalankan program kerja yang ada di KPRI Al-Ikhlas	Ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas	W
30	Apakah ada faktor dan penghambat dalam melaksanakan	Ketua pengurus KPRI Al-Ikhlas dan observasi	W + O

kantor KPRI Al-Ikhlas berada di dalam ruangan koperasi, tepatnya di depan ruangan unit pertokoan. Pada bagian paling depan bangunan atau tepatnya pada depan ruangan unit pertokoan, diteras depan arah pintu masuk area KPRI Al-Ikhlas terdapat bangunan Wartel dan di depan area teras tersebut ditempati kantin yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman bagi anggota KPRI Al-Ikhlas, orang luar atau masyarakat serta murid-murid SMP Negeri 22 ketika beristirahat maupun pulang sekolah. Untuk denah lokasi pada bangunan KPRI Al-Ikhlas terbagi menjadi 5 ruangan di dalamnya. Dapat dijelaskan dengan gambaran yaitu ketika memasuki pintu masuk areal Koperasi Al-Ikhlas terdapat kantin yang paling depan, kemudian di teras koperasi terdapat Wartel, selanjutnya memasuki ruangan koperasi maka di dalamnya terbagi menjadi 5 ruangan. Pada ruangan pertama ini dibagi menjadi 2, yaitu area unit pertokoan dan area unit foto copy yang tanpa ada sekat pembatas. Di area unit pertokoan terdapat beberapa etalase yang diatur sedemikian rupa menjadi agak seperti segi empat, dimana didalamnya terdapat barang-barang yang dijual koperasi. Tepat disebelah area pertokoan terdapat area unit foto copy, yang di depan kedua area tersebut ada beberapa ruang dengan sekat-sekat dinding yang digunakan sebagai pembatas, ruang yang pertama adalah ruang tamu, berfungsi untuk menerima tamu dari luar koperasi. Tepat disebelah ruang tamu terdapat ruang yang tidak begitu sama lebarnya dengan ruang tamu karena ruangan tersebut adalah gudang untuk menyimpan berkas-berkas koperasi. Di sebelah gudang terdapat ruangan

peminjaman tersebut harus dicantumkan berapa jumlah uang yang akan dipinjam serta harus ditandatangani oleh anggota yang pinjam tersebut sebagai bukti anggota tersebut telah benar-benar ingin mengajukan permohonan peminjaman. Namun pihak pengurus telah menetapkan nilai rupiah maksimal untuk meminjam pada KPRI Al-Ikhlas. Kegiatan Kredit pinjaman ini diterapkan dengan ketentuan yaitu anggota yang meminjam dibawah Rp.3 juta, pelunasannya dalam jangka waktu 1 tahun dan jika pinjaman anggota diatas Rp. 3 juta, maka pelunasannya maksimal 3 tahun. Hal ini dilakukan oleh pengurus agar setiap anggota yang meminjam tidak terlampau banyak, sebab masih banyak anggota yang lain ingin meminjam juga. Bila yang mengajukan peminjaman terlalu banyak, maka pihak pengurus harus menyeleksi siapa yang lebih berhak mendapatkan pinjaman, biasanya pengurus lebih mementingkan bagi anggota yang terlebih dahulu mengajukan peminjaman.

Di dalam unit simpan pinjam ini pihak pengurus bekerja sama dengan bank, yaitu bank BTN. Jadi, untuk suku bunga pinjaman yang ditentukan juga tergantung dengan ketentuan pihak bank tersebut. Untuk pembayaran tagihan pada unit simpan pinjam bagi anggota telah diterima pengajuan permohonannya adalah melalui juru bayar pegawai Kandepag dengan potong gaji tiap bulannya. Jadi setiap menerima gaji tiap bulannya gaji tersebut sudah dipotong oleh juru bayar gaji

Unit pertokoan ini terletak di dalam lingkungan Kandepag Kota Surabaya. Jadi kebanyakan yang tahu letaknya adalah para pegawai Kandepag kota Surabaya atau para anggota KPRI Al-Ikhlas sendiri. Tetapi bagi pengunjung Kandepag yang memerlukan sesuatu untuk keperluan, maka pengunjung juga bisa membeli barang di unit pertokoan, tapi kebanyakan dari mereka atau pengunjung Kandepag tidak tahu letaknya dan mereka biasanya diberitahukan oleh pegawai Kandepag Kota Surabaya sendiri.

Di dalam unit pertokoan ini menyediakan barang-barang sekunder seperti pakaian, mukena, kerudung, kacamata, jam tangan, buku-buku bacaan anak-anak, aneka makanan ringan, madu, dan lain-lain.

Pada unit pertokoan ini disamping ada pengurus juga ada karyawan yang melayani pembelian di unit pertokoan. Untuk karyawan di unit pertokoan ada 2 orang, untuk pengurusnya ada satu orang yang mengepalai unit toko.

Sistem yang diterapkan dalam unit pertokoan adalah sistem konsinyasi, yaitu barang dari distributor yang dititipkan di koperasi. Jika barang tersebut tidak begitu laku, maka akan segera dikembalikan oleh koperasi pada distributor perusahaan tersebut, yang kemudian diganti dengan meminta barang atau produk dari perusahaan yang lainnya, sehingga koperasi disini tidak akan menanggung rugi dari

- b) Memberi data akurat unit kapling tanah.
 - c) Membantu administrasi unit usaha kantin.
 - d) Melakukan stock up name tanah kapling.
 - e) Membantu membuat surat keterangan kepada anggota.
 - f) Melaksanakan piket foto haji.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan langsung atau pengurus.
 - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung atau pengurus.
 - i) Melakukan control di lapangan GAI ketika ada pembangunan dan Aset.
 - j) Jam kerja 08.00 Am – 05.00 Pm.
- 3) Untuk Nur Irma Fatmawati, menjabat sebagai karyawan koperasi pada unit simpan pinjam. Adapun uraian tugasnya antara lain :
- a) Membantu Administrasi unit simpan pinjam.
 - b) Memberi data akurat Unit Simpan Pinjam.
 - c) Menerima pelunasan pinjaman anggota dan setor ke bendahara.
 - d) Mencatat simpanan anggota.
 - e) Membuat potongan pinjaman yang disetor ke PDG kantor.
 - f) Membantu perhitungan SHU.
 - g) Mencatat piutang anggota.
 - h) Melaksanakan piket foto haji.

11. Keanggotaan Koperasi Al-Ikhlas

Anggota Koperasi Al-Ikhlas adalah pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam lingkup kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan yang telah mendaftarkan diri ke pengurus sebagai anggota koperasi Al-Ikhlas dan keanggotaannya dinyatakan sah jika telah memenuhi simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- yang kemudian dicatat dalam buku Daftar Anggota Koperasi.

Sebagian besar dari pegawai Kandepag mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Al-Ikhlas karena tidak ada pemaksaan untuk ikut bergabung menjadi anggota koperasi al-Ikhlas tetapi atas dasar sukarela. Jadi yang tidak mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Al-Ikhlas hanya sedikit, karena hampir 95% pegawai Kandepag yang mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Al-Ikhlas dan sisanya hanya 5% yang tidak atau belum mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Al-Ikhlas. Untuk itu merupakan sebagai tugas dari pengurus untuk bisa menarik yang bukan atau belum menjadi anggota koperasi Al-Ikhlas menjadi anggota koperasi Al-Ikhlas, sebab bertambahnya anggota koperasi Al-Ikhlas berarti bertambah pula pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. Jumlah anggota koperasi karyawan untuk saat ini adalah 574 anggota, seperti yang dapat dilihat pada lampiran.

Setiap anggota Koperasi Al-Ikhlas harus mau berpartisipasi terhadap kegiatan koperasi yang dijalankan, karena keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun dan karena

4) Karyawan

Jumlah karyawan pada koperasi Al-Ikhlas yang semula 2 orang dan sejak terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 ada penerimaan karyawan menjadi berjumlah 4 orang, yaitu :

No	Nama
01	Ita Rusdiana
02	Arief Budiman
03	Nur Irma Fatmawati
04	Nena Ayu Maylinda

5) Kegiatan Rapat-Rapat

Rapat-rapat yang diselenggarakan KPRI Al-Ikhlas tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Anggota
01	RAT	1 kali
02	Rapat Kerja (Pleno)	2 kali
03	Rapat Pengurus	15 kali
04	Rapat Unit	8 kali

b. Bidang Administrasi

1) Buku Administrasi Organisasi

a) Buku Pokok

No	Nama	Pengerjaan
01	Buku daftar anggota	Setiap ada anggota masuk
02	Buku daftar pengurus	Setiap pergantian pengurus
03	Buku karyawan Buku simpanan Anggota	Setiap pergantian karyawan
04	Buku Nota Kep. Rapan Anggota	Setiap kali rapat anggota
05	Buku Nota Kep. Rapat Pengurus	Setiap kali rapat pengurus

b) Buku Penunjang

No	Nama	Pengerjaan
01	Buku tamu	Setiap ada tamu datang
02	Buku inventaris	Setiap ada barang inventaris baru
03	Buku agenda	Setiap ada perencanaan acara
04	Buku ekspedisi	Setiap ada pengiriman surat keluar

2) Buku Administrasi Pembukaan

a) Buku Bukti Pembukuan

No	Nama	Pengerjaan
01	Bukti kas masuk	Setiap hari ada kas masuk
02	Bukti kas keluar	Setiap hari ada kas keluar
03	Bukti penjualan	Setiap ada transaksi penjualan
04	Bukti pembelian	Setiap ada transaksi pembelian

b) Buku Jurnal

No	Nama	Pengerjaan
01	Jurnal Kas Masuk	Setiap hari kas masuk
02	Jurnal kas keluar	Setiap hari kas keluar
03	Jurnal memorial	Setiap hari

c) Buku Bantu

No	Nama	Pengerjaan
01	Buku Kas	Setiap hari
02	Buku Bank	Setiap ada transaksi tiap bulan
03	Buku Piutang	Setiap ada transaksi piutang
04	Buku Persediaan	Setiap ada barang masuk
05	Buku Pembelian	Setiap ada pembelian barang
06	Buku Hutang	Setiap ada transaksi hutang
07	Buku Penjualan	Setiap ada transaksi penjualan
08	Buku Pendapatan USP	Setiap perhitungan RAT

d) Buku Laporan Keuangan

No	Nama	Pengerjaan
01	Neraca	Setiap bulan
02	Perhitungan SHU	Setiap tahun
03	Buku RRAPB	Setiap tahun

c. Bidang Permodalan, Usaha Dan Sisa Hasil Usaha (SHU)

1) Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Luar

Perkembangan modal sendiri dan modal luar KPRI Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya tahun 2006 dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No	Sumber	Tahun 2006	Tahun 2007
01	Modal sendiri		
	a. Simpanan Pokok Anggota	Rp. 10.685.000	Rp. 14.680.000
	b. Simpanan Wajib Anggota	Rp. 732.249.580	Rp. 816.906.740
	c. Cadangan Koperasi	Rp. 320.467.403	Rp. 348.698.653
	d. Donasi	Rp. 8.501.777	Rp. 8.501.777
	Jumlah Prosentase	Rp. 1.071.903.760 5.90%	Rp. 1.188.787.170 10.90%
02	Hutang jangka pendek		
	a. Simpanan manasuka anggota	Rp. 39.210.427	Rp. 41.814.187
	b. Dana karyawan	Rp. 34.013.215	Rp. 34.168.515
	c. Dana pendidikan	Rp. 44.574.765	Rp. 27.797.261
	d. Dana sosial	Rp. 32.163.920	Rp. 28.259.220
	e. Dana pengurus	Rp. 296.942	Rp. 307.442
	Jumlah Prosentase	Rp.150.259.069 5.39%	Rp. 132.346.625 - 11.92%

2) Bidang Usaha

a) Situasi dan Hasil Perusahaan (dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Usaha	Jumlah Modal	Volume Usaha	Laba Kantor	Biaya	SHU	Ket
1	USP	3.205	2.343	701.1	491.8	209.3	
2	UPB						
3	UFC						
4	UKM						
5	UKPT						

Pendapatan

Pendapatan pertokoan	Rp.	13.438.650,-
Pendapatan Unit simpan pinjam	Rp.	664.327.900,-
Pendapatan sepeda motor	Rp.	262.500,-
Pendapatan CJH	Rp.	16.790.000,-
Pendapatan Kantin	Rp.	1.564.975,-
Pendapatan Wartel	Rp.	467.900,-
Pendapatan Lain-lain	Rp.	4.324.664,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 701.176.579,-

Beban-beban

1. Beban Pembinaan Anggota		
a. Beban RAT	Rp.	17.499.200,-
b. Beban lain-lain	Rp.	--,-
	Rp.	17.499.200,-
2. Beban Operasional		
a. Beban rapat pengurus	Rp.	4.950.000
b. Beban bunga	Rp.	402.731.322
c. Beban Adm bank	Rp.	19.410.439
d. Beban lain-lain / cetak kalender	Rp.	2.410.000
	Rp.	429.501.761
3. Beban administrasi & umum		
a. Beban HR Pengrs & Pengawas	Rp.	8.000.000
b. Beban gaji karyawan	Rp.	12.400.000
c. Beban HR pemotong Gaji	Rp.	1.200.000
d. Beban Transport	Rp.	2.560.705
e. Beban ATK	Rp.	3.150.025
f. Beban listrik / telepon	Rp.	3.560.364
g. Beban pemeliharaan inventaris	Rp.	7.484.600
h. Beban lain-lain	Rp.	786.350
	Rp.	39.142.044
4. Beban Penyusutan		

a. Beban penyusutan gedung	Rp.	2.413.630
b. Beban penyusutan inventaris	Rp.	3.305.190
	Rp.	5.718.820
JUMLAH BEBAN		Rp. 491.861.825
SHU TAHUN 2007		Rp. 209.314.754

PEMBAGIAN SHU.⁸⁷

SHU tahun 2007	Rp.	209.314.754
45 % Anggota	Rp.	94.916.393
10 % Pengurus	Rp.	20.931.475
5 % Karyawan	Rp.	10.465.737
5 % Dana Pendidikan	Rp.	10.465.737
5 % Dana Sosial	Rp.	10.465.737
30 % Cadangan	Rp.	62.794.425

GDFHAS2HS

⁸⁷ Sumber Dokumen Pengawas Hasil RAT KPRI Al-Ikhlas yang dilaksanakan 26 Maret 2008, KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya dan Hasil wawancara dengan Unit Simpan Pinjam, Abd. Ghofur Ismail, S.E,M.M, Tanggal 10-12 Juni 2008.

Adanya suatu perencanaan di KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya dapat bermanfaat, sebagaimana yang diungkapkan Drs. H.R. Muzahid, M.H.i, bahwa :

“Adanya suatu perencanaan pada koperasi Al-Ikhlas dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kerja pengurus Koperasi (yaitu dengan dilihat dari kebaikan yang ada pada setiap unit usaha koperasi, misalkan pada unit pertokoan, maka dapat dilihat dari adanya penambahan barang-barang atau lainnya bagi unit pertokoan) yang menjadi tolak ukur pada SHU”.

Untuk melaksanakan suatu perencanaan maka proses itu segera dilakukan akan lebih baik, sehingga lebih cepat, tujuan apa yang akan diinginkan dan dapat dipecahkan secara ilmiah serta memuaskan, proses itu dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Sebagaimana yang dilakukan di KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya yang telah diungkapkan oleh Drs. H.R. Muzahid, M.H.i:

“Bahwa proses perencanaan itu dilakukan melalui konsep yang diajukan sebelum RAT, yaitu rapat pengurus dan pengawas untuk rapat RAT yang nantinya disahkan pada saat RAT”.

Setiap perencanaan-perencanaan yang ada telah dibuat maka mempunyai ciri-ciri tersendiri dan ciri-ciri tersebut yang tahu hanyalah lingkup organisasi yang bersangkutan, sebagaimana ciri-ciri perencanaan yang ada di KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya.

Menurut Drs. H.R. Muzahid, M.H.i :

“Mengatakan tentang ciri-ciri perencanaan yang ada di KPRI Al-Ikhlas ini dengan adanya wacana (usulan) yang mengikuti unit-unit yang ada di KPRI Al-Ikhlas yang meliputi unit simpan

kriteria atau prasyarat sebagai pengurus organisasi maka dapat dikatakan SDM tersebut bisa diandalkan dalam menjalankan sebuah aktifitas dalam organisasi, dan perlu diketahui dalam merekrut anggota pengurus itu tidak mudah karena itu dibutuhkan suatu seleksi seperti apa dia, dan darimana dia. Maka dari itu, sangat tidak mudah dalam perekrutan anggota baru atau kenaikan jabatan. Dalam artian siapa yang akan menjadi pimpinan pada periode berikutnya.

Menurut Drs. H.R. Muzahid, M.H.i, bahwa :

“Mengenai SDM yang dimiliki KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya bisa dikatakan sangat baik antara 85-90 % diartikan dari segi pengalaman dalam pengertian koperasi karena semua pengurusnya orang lama dan anggota lama koperasi, dan dari segi tersebut akan mempengaruhi pemilihan ketua untuk mengepalai pengelolaan koperasi, yang teknisnya yaitu dalam rapat Tim Formatur untuk pemilihan pengurus, diberi kebebasan mencalonkan 7 orang sebagai pilihan, yaitu 2 orang dinas PKPRI (perkumpulan dan pembina dari Kakandepag), 1 orang dari basis KUA, 1 orang dari basis guru, 1 orang dari pengawas, 1 orang dari Kantor Depag dan yang terakhir 1 orang dari pengurus lama. Namun bila dilihat dari segi kehadiran atau keaktifan bisa dikatakan tidak begitu baik atau kurang (sedang) dalam artian kehadiran atau keaktifan pengurus, yaitu antara 60-70%, tapi selalu berupaya untuk meningkatkan, karena pengurus dan anggota koperasi yang ada adalah rata-rata sebagai pegawai negeri Kandepag dan pejabat. Sehingga waktu mereka sangat padat untuk kegiatan luar, tapi bukan berarti mereka tidak pernah hadir pada rapat-rapat penting koperasi, kehadiran mereka dalam rapat tidak begitu minim. Kalaupun ada rapat koperasi, dari 100% yang hadir 50-65% saja. Apalagi organisasi Al-Ikhlas ini pengurus dan anggotanya tidak diharuskan setiap hari ada di koperasi, hanya orang-orang tertentu seperti saya Ketua Umum Pengurus Koperasi (Drs. H. R. Muzahid, M.Hi), Sekretaris Umum (Drs. H. Suba'i), Bendahara I (H.A. Bustami, S.Sos, M.Si), Unit Kapling Tanah (Drs. H. Muslimin Ahmad), Unit Toko (Drs. Rohib), dan Unit Simpan Pinjam (Abd. Ghofur Ismail, S.E, M.M), yang memang dituntut sebagai pengurus inti untuk setiap hari menangani teknis koperasi. Walaupun semua yang

Oleh karena itu, berdasarkan judul “Studi Analisis Perencanaan Program Kerja Bidang Usaha Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya”. Maka dalam menganalisa penulis menggunakan teknik Componential Analysis (Teknik Analisis Komponensial). Penulis menggunakan teknik ini karena teknik ini merupakan teknik analisis yang cukup menarik dan paling mudah dilakukan, penulis mencoba untuk menganalisa data sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dan dihubungkan dengan teori yang ada, kemudian dirumuskan kembali dan hasil rumusan tersebut merupakan teori baru yang muncul pada penelitian ini, yang didasarkan realita yang terjadi di lapangan.

Untuk lebih jelasnya disini penulis akan memaparkan berbagai wacana temuan, dan selanjutnya akan membandingkan dengan teori yang ada yang berkaitan dengan fokus penelitian ini diantaranya :

1. Perencanaan Program Kerja KPRI Al-Ikhlas

Proses perencanaan program kerja merupakan langkah awal dalam menentukan sebuah organisasi, karena dengan adanya perencanaan yang efektif akan menjadikan suatu organisasi yang terarah dan maju.

Dengan adanya sebuah perencanaan dalam organisasi maka akan lebih terarah dan terukur. Hal ini terjadi disebabkan dengan adanya pemikiran yang matang dalam menentukan hal-hal yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melakukannya, dimana, kapan, serta dana yang ada dan tak lupa faktor yang sangat berpengaruh sekali adalah kondisi sumber daya manusia yang ada karena dengan terpenuhinya semua yang telah

dibutuhkan, maka apa yang diinginkan organisasi akan tercapai secara maksimal.

Menurut Newman, mengatakan “Planning is deciding in advance what is to be done” (Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan terjadi). Menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Siagian. S.P. dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Administrasi”, menjelaskan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disepakati.

Sedangkan menurut A.W. Widjaja dalam bukunya “Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen”, menyatakan bahwa perencanaan adalah penting, karena perencanaan akan memberi efek baik pada pelaksanaan maupun pengawasan, suatu perencanaan merupakan langkah pertama dalam mencapai suatu pekerjaan.

Dari beberapa pendapat teori di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu serangkaian tindakan apa yang akan terjadi melalui proses pemikiran matang yang akan memberikan efek baik pelaksanaan program yang telah disepakati untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan.

Maka dapat dikatakan bahwa perencanaan KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya adalah membuat konsep yang digunakan sebagai acuan dan

Dengan demikian, dari penelitian yang dilakukan selama ini, berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan mengenai penerapan perencanaan program kerja bidang usaha pengurus KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya ada yang berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan dengan baik.

Analisa penulis mengenai penerapan program kerja yang ada, tidak semua dapat berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, karena dalam melaksanakan program kerja banyak mengalami hambatan-hambatan. Kesimpulan dari penerapan berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan ada yang berjalan dengan baik walaupun masih belum maksimal paling tidak dari perencanaan sampai proses pelaksanaannya khusus bidang usaha telah sesuai dengan target yang direncanakan. Meskipun diketahui bahwa perencanaan program kerja bukan satu-satunya penunjang peningkatan, perkembangan dan kemajuan KPRI Al-Ikhlas, paling tidak dengan adanya perencanaan program kerja yang baik, bisa menentukan jalan untuk menciptakan KPRI Al-Ikhlas sesuai yang diharapkan. Selama ini kendala atau hambatan yang dialami dalam penerapan atau pelaksanaan perencanaan program kerja bidang usaha pengurus KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya adalah mengenai sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang ada di KPRI Al-Ikhlas pada anggota maupun pengurus KPRI Al-Ikhlas yang adalah rata-rata

sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Kandepag, sehingga lebih mementingkan kegiatan diluar, yang mana dalam pengelolaan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang usaha pengurus KPRI Al-Ikhlas ada yang tidak maksimal dan belum bisa terlaksana sampai dengan saat penelitian. Dengan kondisi diatas, perencanaan program kerja bidang usaha pengurus KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya sangat berdampak pada pelaksanaan perencanaan program kerja bidang usaha dalam melaksanakan program dan aktifitas yang telah ditetapkan.

D. Pembahasan

Pentingnya perencanaan program kerja adalah semakin menunjukkan pencapaian tujuan suatu organisasi, karena dengan program kerja organisasi akan lebih terarah dalam merencanakan arah tujuan masa depan yang ingin dicapai. Seperti halnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Surabaya (KPRI Al-Ikhlas Kandepag Kota Surabaya) dalam merencanakan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang yaitu dengan membuat suatu program kerja. Dengan berbekal program kerja inilah KPRI Al-Ikhlas membuat rencana-rencana yang dapat menjadikan organisasi koperasi ini lebih baik lagi.

Dalam perencanaan program kerja yang dilakukan KPRI Al-Ikhlas berdasarkan pada perencanaan yang matang sudah tepat direncanakan secara matang oleh KPRI Al-Ikhlas yaitu dilakukan melalui wacana (usulan) dari tiap unit usaha yang ada di KPRI Al-Ikhlas yang diajukan pada rapat pengurus dan

rapat pengawas sebelum dilaksanakan RAT dan disepakati bersama melalui RAT. Yang mana sama halnya dengan pendekatan sistem P4 yang inti pembahasannya melalui pendekatan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaporan. Untuk pendekatan sistem perencanaan, KPRI Al-Ikhlas telah menyiapkan rencana kerja yaitu bidang organisasi, bidang permodalan, bidang usaha, dan kesejahteraan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama satu kali masa bakti kepengurusan. Untuk pendekatan sistem pemrograman, KPRI Al-Ikhlas telah menyiapkan program kerja untuk pencapaian tujuan selama satu tahun yang merupakan penjabaran dalam perencanaan yang disusun secara lebih nyata, praktis dan pragmatis. Pada pendekatan sistem penganggaran, KPRI Al-Ikhlas telah membuat anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang disiapkan untuk menunjang program kerja tersebut dengan jangka waktu yang sesuai pada program kerja. Untuk pendekatan sistem pelaporan, KPRI Al-Ikhlas telah menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun buku pada Rapat Anggota yang berkaitan dengan realisasi program kerja, RAPB serta terhadap pelaporan keuangan.

Dengan demikian KPRI Al-Ikhlas telah mencapai unsur-unsur pendekatan sistem P4 melalui sistem manajemen kinerja program kerja tersebut dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan program kerja melalui segi anggaran dana (RAPB) sendiri, serta kelengkapan fasilitas. Selanjutnya metode kerja yang digunakan KPRI Al-Ikhlas pada pelaksanaan program kerja yaitu secara langsung pada setiap

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka
- Siagian P. Sondang, 1996, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Siti Aisyatul Fajriyah, *Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Panti Asuhan Al-Hasan di Desa Watu Galuh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang* (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)
- Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga
- Sukamdiyo, 1997, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Erlangga
- Sukarna, 1992, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : Mandar Maju
- Surya Heni, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen (Studi Analisis Program Kerja Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur)* (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)
- Sutarto Parianata Westa dan Ibnu Syamsi, 1989, *Ensiklopedi Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Terry George R, 1993, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara
- _____ dan L. W. Rue, 1997, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Usman Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara
- Widiyanti Ninik, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Widjaja Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Wijaya A. W, 1984, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Yunus Mahmud, 1993, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung